

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kawasan perkotaan, khususnya Jabodetabek, menghadapi berbagai tantangan sosial yang semakin kompleks. Salah satu isu yang mulai mendapat perhatian adalah melemahnya keterikatan sosial antarwarga. Dalam kehidupan kota yang serba cepat, relasi sosial cenderung menjadi lebih fungsional dan impersonal (Muluk, 2022). Kondisi ini berpotensi memengaruhi kemampuan masyarakat dalam menjaga norma dan ketertiban secara bersama. Salah satu indikator penting dari kemampuan tersebut adalah *informal social control*, yaitu mekanisme pengendalian sosial yang tumbuh secara spontan melalui partisipasi dan kepedulian warga (Linning et al., 2024). Ketika mekanisme ini melemah, stabilitas sosial di tingkat komunitas dapat ikut terdampak.

Informal social control merupakan salah satu bentuk pengendalian sosial yang berperan dalam menjaga ketertiban melalui keterlibatan masyarakat dalam merespons pelanggaran norma di lingkungan sekitarnya. Mengacu pada Sampson et al. (1997), *informal social control* merupakan salah satu komponen *collective efficacy*, yaitu kemampuan suatu komunitas untuk mencapai tujuan bersama melalui kepercayaan sosial (*social cohesion and trust*) serta ekspektasi bersama untuk melakukan tindakan pengendalian sosial (*shared expectations for informal social control*). Sejalan dengan itu, Linning et al. (2024) mendefinisikan *informal social control* sebagai tindakan pengawasan dan intervensi yang dilakukan warga tanpa melibatkan institusi formal. Dengan demikian, *informal social control* mencerminkan kemampuan masyarakat untuk secara sukarela menjaga ketertiban dan merespons berbagai permasalahan sosial yang terjadi di lingkungan tempat tinggalnya.

Kemampuan masyarakat dalam menjalankan *informal social control* tidak hanya ditentukan oleh keberadaan hubungan sosial antarwarga, tetapi juga oleh kesediaan masyarakat untuk terlibat dalam kehidupan komunitas. Melalui konsep *collective efficacy*, Sampson et al. (1997) menekankan bahwa hubungan sosial akan berfungsi secara optimal apabila disertai dengan kepercayaan serta kemauan bersama untuk bertindak demi kepentingan komunitas. Oleh karena itu, efektivitas *informal social control* sangat dipengaruhi oleh kesiapan individu untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan melakukan intervensi ketika terjadi pelanggaran norma. Hal tersebut sejalan dengan Hendriana et al. (2025) yang menyatakan bahwa efektivitas kontrol sosial sangat bergantung pada keterlibatan aktif masyarakat dalam menjaga lingkungannya.

Namun, keterlibatan sosial tersebut tidak selalu mudah terwujud, terutama pada masyarakat yang tinggal di kawasan metropolitan. Muluk (2022) menjelaskan bahwa relasi sosial di kawasan perkotaan cenderung berkembang menjadi lebih fungsional dan impersonal sehingga kesempatan untuk membangun kepercayaan dan kohesi sosial menjadi semakin terbatas. Kondisi tersebut dapat mengurangi kesediaan warga untuk saling mengingatkan, menegur, maupun mencegah perilaku yang menyimpang di lingkungan sekitarnya. Akibatnya, kapasitas masyarakat untuk menjalankan *informal social control* berpotensi melemah. Fenomena ini menunjukkan bahwa dinamika sosial di kawasan perkotaan tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi struktural, tetapi juga oleh bagaimana individu membangun keterlibatan dalam kehidupan sosial di lingkungannya.

Implikasi dari berkurangnya kapasitas kolektif ini dapat terlihat pada dinamika keamanan sosial. Laporan Statistik Kriminal 2024–2025 menunjukkan bahwa wilayah perkotaan dengan kepadatan tinggi masih menyumbang proporsi signifikan terhadap angka tindak kejahatan nasional. Kasus tersebut terutama terlihat pada kategori pencurian, kekerasan, dan kejahatan jalanan. Meskipun kejahatan dipengaruhi oleh berbagai faktor struktural, lemahnya keterlibatan warga dalam pengawasan sosial sehari-hari dapat memperbesar peluang terjadinya pelanggaran norma. Kondisi ini

mengindikasikan bahwa faktor psikologis yang memengaruhi kesediaan individu untuk bertindak juga berperan dalam dinamika keamanan lingkungan. Dalam perspektif *bystander intervention*, rendahnya respons warga terhadap situasi mencurigakan dapat menciptakan ruang yang lebih permisif terhadap perilaku menyimpang (Darley & Latané, 1968).

Fenomena ini juga diperkuat oleh berbagai laporan media yang menggambarkan meningkatnya sikap apatis di kota-kota besar. Tradisi gotong royong yang dahulu menjadi ciri khas masyarakat Indonesia dilaporkan mulai berkurang intensitasnya di wilayah perkotaan. Meskipun gotong royong bukan satu-satunya bentuk kontrol sosial informal, aktivitas tersebut mencerminkan adanya kohesi dan tanggung jawab bersama dalam komunitas. Ketika keterlibatan dalam kegiatan komunal menurun, hal itu dapat menjadi indikasi melemahnya ikatan sosial (Muluk, 2022). Dengan kata lain, perubahan dalam pola interaksi sosial berpotensi memengaruhi efektivitas kontrol sosial di tingkat lingkungan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai faktor-faktor yang mungkin berperan dalam perubahan dinamika sosial masyarakat perkotaan.

Wilayah Jabodetabek sendiri merupakan salah satu kawasan metropolitan dengan tingkat kepadatan dan mobilitas yang sangat tinggi dibandingkan banyak wilayah lain di Indonesia. Data Badan Pusat Statistik (2025) menunjukkan bahwa DKI Jakarta termasuk daerah dengan kepadatan penduduk tertinggi secara nasional. Selain jumlah penduduk yang besar, mobilitas harian dari wilayah penyangga seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi turut meningkatkan intensitas pertemuan dalam ruang terbatas. Kondisi ini membuat individu terus-menerus berinteraksi dengan banyak orang dalam berbagai situasi. Paparan sosial yang tinggi tersebut dapat memunculkan pengalaman subjektif tertentu terhadap lingkungan. Dalam psikologi lingkungan, pengalaman ini dikenal sebagai persepsi kepadatan (Hanurawan, 2024).

Persepsi kepadatan berbeda dengan kepadatan objektif yang diukur berdasarkan jumlah penduduk atau luas wilayah. Hanurawan (2024) menjelaskan bahwa kepadatan objektif merujuk pada kondisi fisik

lingkungan yang dapat diukur secara kuantitatif, sedangkan persepsi kepadatan merupakan evaluasi psikologis individu terhadap kondisi ruang yang dialaminya. Oleh karena itu, dua individu yang berada pada lingkungan dengan tingkat kepadatan yang sama belum tentu memiliki pengalaman psikologis yang serupa. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kebutuhan ruang personal, pengalaman sebelumnya, dan preferensi individu terhadap interaksi sosial (Hanurawan, 2024). Ketika lingkungan dipersepsikan terlalu padat atau sesak (*crowding*), individu dapat mengalami rasa tidak nyaman, kehilangan privasi, serta berkurangnya kontrol terhadap lingkungan sekitarnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kepadatan sebagai pengalaman subjektif berpotensi memengaruhi bagaimana individu merespons lingkungan sosialnya.

Tekanan psikologis akibat pengalaman *crowding* dapat dijelaskan melalui *Stimulus Overload Theory* yang dikemukakan oleh Milgram (1982). Menurut Milgram, kehidupan di lingkungan perkotaan ditandai oleh tingginya intensitas rangsangan sosial, seperti kepadatan manusia, kebisingan, serta paparan informasi yang terus-menerus. Untuk mempertahankan keseimbangan kognitif dan emosional, individu akan melakukan penyaringan terhadap berbagai rangsangan yang diterima sebagai bentuk adaptasi. Salah satu bentuk penyesuaian tersebut adalah mengurangi perhatian terhadap lingkungan sekitar dan membatasi keterlibatan dalam interaksi sosial. Dengan demikian, persepsi terhadap lingkungan yang padat secara teoritis dapat meningkatkan kecenderungan individu untuk mengurangi interaksi sosial sebagai respons terhadap beban rangsangan yang berlebihan.

Salah satu pengalaman sosial yang dapat muncul dalam konteks kehidupan perkotaan yang padat adalah meningkatnya perasaan kesepian. Survei HCC yang dilaporkan oleh Kompas menunjukkan bahwa sekitar 44 persen warga Jabodetabek mengaku merasa kesepian (HCC, 2024). Temuan ini menggambarkan adanya paradoks kehidupan kota, di mana individu dapat merasa terasing meskipun berada di tengah keramaian. Kepadatan dan intensitas pertemuan sosial tidak selalu menghasilkan kedekatan emosional

yang bermakna (Sahlan, 2024). Perasaan kesepian ini menunjukkan bahwa kualitas interaksi sosial dapat berbeda dari kuantitasnya. Kondisi tersebut membuka kemungkinan adanya proses psikologis tertentu yang memengaruhi dinamika sosial masyarakat perkotaan.

Dalam psikologi sosial, pengalaman kesepian dan keterasingan sering dikaitkan dengan kecenderungan *social withdrawal*. Konsep ini merujuk pada kecenderungan individu untuk mengurangi atau menghindari keterlibatan dalam interaksi sosial, baik secara fisik maupun emosional (Sahlan, 2024). Watson dan Friend (1969) menjelaskan bahwa individu yang mengalami *social avoidance* dan *social distress* cenderung merasa tidak nyaman dalam situasi sosial sehingga lebih memilih menghindari interaksi dengan orang lain. Dalam konteks kehidupan perkotaan yang padat, kecenderungan tersebut dapat muncul sebagai bentuk penyesuaian terhadap tekanan atau ketidaknyamanan yang dirasakan individu akibat lingkungan sosial yang penuh rangsangan (Hanurawan, 2024). Dengan demikian, *social withdrawal* dipandang sebagai salah satu respons psikologis yang berpotensi muncul ketika individu memersepsikan lingkungannya sebagai padat dan kurang nyaman.

Di sisi lain, apabila kecenderungan *social withdrawal* terjadi secara luas dan berulang, dampaknya tidak hanya dirasakan pada tingkat individu, tetapi juga berpotensi memengaruhi dinamika sosial di tingkat komunitas. Berkurangnya keterlibatan individu dalam interaksi sosial dapat melemahkan pembentukan kepercayaan, kepedulian, serta rasa tanggung jawab bersama terhadap lingkungan tempat tinggal. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat mengurangi kesediaan masyarakat untuk melakukan pengawasan maupun intervensi terhadap pelanggaran norma yang terjadi di sekitarnya. Fenomena ini sejalan dengan konsep *bystander intervention* yang telah dijelaskan sebelumnya, di mana individu cenderung tidak memberikan respons ketika tanggung jawab untuk bertindak dirasakan semakin kecil akibat rendahnya keterlibatan sosial (Darley & Latané, 1968). Oleh karena itu, *social withdrawal* secara teoritis diperkirakan menjadi salah satu mekanisme

psikologis yang dapat menjelaskan hubungan antara persepsi kepadatan lingkungan perkotaan dan *informal social control*.

Muluk (2022) menegaskan bahwa analisis mengenai masyarakat perkotaan perlu mempertimbangkan dimensi psikologis agar tidak hanya berfokus pada faktor-faktor struktural. Dalam konteks tersebut, persepsi kepadatan lingkungan yang menimbulkan ketidaknyamanan berpotensi memengaruhi bagaimana individu merespons lingkungan sosialnya, termasuk melalui kecenderungan *social withdrawal*. Namun, penelitian mengenai *social withdrawal* di Indonesia masih lebih banyak berfokus pada konteks digital dan kesehatan mental individu (Sahlan, 2024). Di sisi lain, penelitian mengenai persepsi kepadatan lingkungan umumnya dikaitkan dengan kesejahteraan psikologis, seperti kepuasan hidup (Zefanya & Pelupossy, n.d.), sedangkan penelitian mengenai *informal social control* lebih banyak dilakukan dalam konteks kriminologi dan pencegahan kejahatan (Linning et al., 2024).

Berdasarkan kajian tersebut, masih terdapat keterbatasan penelitian yang mengintegrasikan persepsi kepadatan lingkungan perkotaan, *social withdrawal*, dan *informal social control* dalam satu model penelitian, khususnya pada masyarakat metropolitan Jabodetabek. Padahal, dinamika sosial di wilayah perkotaan tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi lingkungan fisik maupun faktor sosial secara terpisah, tetapi juga oleh bagaimana individu memersepsikan lingkungan dan meresponsnya secara psikologis. Oleh karena itu, penelitian ini mengusulkan model yang menghubungkan persepsi kepadatan lingkungan perkotaan dengan *informal social control* melalui *social withdrawal* sebagai variabel mediator. Model tersebut diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai mekanisme psikologis yang mendasari dinamika kontrol sosial pada masyarakat metropolitan serta memperkaya kajian psikologi lingkungan dan psikologi sosial di Indonesia.

Pemahaman mengenai mekanisme psikologis yang mendasari dinamika sosial masyarakat perkotaan menjadi penting karena upaya dalam menjaga kualitas kehidupan sosial tidak cukup hanya berfokus pada aspek struktural,

tetapi juga perlu mempertimbangkan faktor psikologis individu yang memengaruhi perilaku sosial. Dalam konteks kehidupan metropolitan, persepsi individu terhadap kepadatan lingkungan diduga memengaruhi cara individu berinteraksi dengan lingkungan sosialnya, termasuk kecenderungan untuk menarik diri dari interaksi sosial (*social withdrawal*). Berkurangnya keterlibatan sosial tersebut secara teoritis diperkirakan dapat memengaruhi kesiapan masyarakat dalam melakukan *informal social control*. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mampu menjelaskan mekanisme psikologis yang menghubungkan persepsi kepadatan lingkungan perkotaan dengan *informal social control* melalui *social withdrawal*.

Jika kondisi tersebut terus berlangsung, dampaknya dapat berupa menurunnya kepedulian sosial antarwarga, melemahnya pengawasan sosial di lingkungan masyarakat, serta meningkatnya berbagai permasalahan sosial di wilayah perkotaan. Di sisi lain, penelitian yang mengkaji hubungan antara persepsi kepadatan lingkungan perkotaan, *social withdrawal*, dan *informal social control* masih terbatas, khususnya pada konteks masyarakat metropolitan Jabodetabek. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini perlu dilakukan untuk memberikan pemahaman empiris mengenai dinamika psikososial masyarakat perkotaan serta menjadi dasar pertimbangan dalam pengembangan intervensi maupun kebijakan yang mendukung terciptanya lingkungan sosial yang lebih adaptif, partisipatif, dan berdaya dalam menghadapi tantangan kehidupan metropolitan.

1.2 Identifikasi masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

- a. Meningkatnya kompleksitas dinamika sosial dan keamanan di kawasan perkotaan padat seperti Jabodetabek, yang menunjukkan masih rentannya stabilitas sosial di tingkat komunitas.
- b. Melemahnya keterikatan sosial antarwarga akibat pola relasi yang semakin fungsional, impersonal, dan individualistik dalam kehidupan kota.

- c. Indikasi menurunnya partisipasi dan kepedulian warga dalam menjaga norma dan ketertiban lingkungan, yang berpotensi mencerminkan melemahnya *informal social control*.
- d. Tingginya kepadatan dan mobilitas sosial di wilayah metropolitan yang meningkatkan paparan sosial dalam ruang terbatas dan berpotensi memunculkan pengalaman *crowding* serta stres lingkungan.
- e. Adanya perbedaan antara kepadatan objektif dan *persepsi kepadatan* yang bersifat subjektif, yang dapat memengaruhi respons psikologis individu terhadap lingkungannya.
- f. Meningkatnya pengalaman kesepian dan kecenderungan *social withdrawal* pada masyarakat perkotaan, yang berpotensi mengurangi keterlibatan dalam interaksi dan aktivitas komunitas.
- g. Kemungkinan terjadinya mekanisme *diffusion of responsibility* dalam konteks lingkungan padat dan anonim, yang dapat menurunkan kesiapan individu untuk melakukan intervensi sosial.
- h. Belum terujinya secara empiris model yang mengintegrasikan *persepsi kepadatan*, *social withdrawal*, dan *informal social control* dalam konteks masyarakat metropolitan Indonesia, khususnya Jabodetabek.

1.3 Batasan masalah

Agar ruang lingkup penelitian tidak terlalu luas dan tetap berada dalam fokus kajian, maka batasan masalah dalam penelitian ini dibatasi pada pengkajian Peran Mediasi *Social withdrawal* dalam Hubungan antara Persepsi Kepadatan Lingkungan Perkotaan dan *Informal social control* pada Masyarakat Metropolitan Jabodetabek.

1.4 Rumusan masalah

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan pada latar belakang dan batasan masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah "Apakah terdapat peran mediasi *social withdrawal* dalam hubungan antara

persepsi kepadatan lingkungan perkotaan dan informal social control pada masyarakat metropolitan Jabodetabek?”

1.5 Tujuan penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui ”Peran Mediasi *Social withdrawal* dalam Hubungan antara Persepsi Kepadatan Lingkungan Perkotaan dan *Informal social control* pada Masyarakat Metropolitan Jabodetabek”

1.6 Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yang dijelaskan sebagai berikut:

1.6.1 Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian psikologi lingkungan dan psikologi sosial dengan mengintegrasikan persepsi kepadatan dan *informal social control* melalui mekanisme *social withdrawal*. Penelitian ini juga memberikan kontribusi empiris dalam konteks masyarakat perkotaan Indonesia yang masih terbatas dalam literatur. Selain itu, temuan penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman mengenai hubungan antara faktor lingkungan fisik dan dinamika perilaku sosial komunitas.

1.6.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat praktis bagi beberapa pihak, di antaranya adalah:

a. Pemerintah Daerah dan Perencana Kota

Memberikan masukan sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dan perencana kota dalam penyusunan kebijakan serta pengembangan lingkungan perkotaan yang memperhatikan kondisi dan dinamika masyarakat di wilayah metropolitan.

b. Masyarakat Jabodetabek

Menambah pemahaman mengenai dampak persepsi kepadatan terhadap kecenderungan menarik diri sebagai bentuk *social withdrawal* dan melemahnya kepedulian sosial, serta mendorong kesadaran untuk tetap menjaga keterlibatan dan tanggung jawab sosial di lingkungan sekitar.

c. Peneliti Selanjutnya

Menjadi referensi dan dasar pertimbangan bagi penelitian lanjutan yang berkaitan dengan persepsi lingkungan perkotaan, *social withdrawal*, *informal social control*, maupun dinamika *collective efficacy* pada masyarakat urban.

